



STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

SOP

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

UPT. Pemadam Kebakaran

KOTA BLITAR
TAHUN 2025

 <p>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR</p>	NOMOR SOP	:	188/SOP-15/410.118/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	:	03 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	:	-
	TANGGAL EFektif	:	03 MARET 2025
	DISAHKAN OLEH	:	Kepala Satpol PP Kota Blitar  Ronny Yosep Pasalbesy, S.Sos.,M.M. NIP. 681104 198809 1 001
UPT PEMADAM KEBAKARAN (PMK)	NAMA SOP	:	RESPON CEPAT PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN (PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Keteriban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; 		

11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	<p>KETERKAITAN</p> <p>1. -</p> <p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perangkat komputer, printer dan jaringan internet 2. APK (Alat Perlengkapan Kantor) 3. ATK (Alat Tulis Kantor) 4. Pesawat Telepon dan Handy Talky 5. Surat Perintah Tugas (SPT) 6. Mobil Pemadam Kebakaran 7. Kendaraan Dinas (Roda 2 dan Roda 4) 8. Form Laporan/Berita Acara Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 9. Buku Register Pelayanan dan Formulir Pelayanan 10. Aplikasi pendukung lainnya <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>PERINGATAN</p> <p>1. Apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Satpol PP</p> <p>1. Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan sebagai data fisik dan elektronik</p>
--	--



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

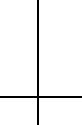
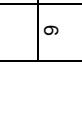
UPT PEMADAM KEBAKARAN

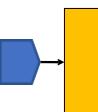
RESPON CEPAT PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN (PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Keterangan
		Pelapor/ Masyarakat	Operator 112/113/(0342) 802791	Layanan UPT PMK	Petugas Petugas/Regu Pemadam	Kepala UPT PMK	Kepala Satpol IPP	
1	Melaporkan bahwa telah melihat kejadian kebakaran/ menyampaikan bahwa rumah pelapor terkena kebakaran melalui layanan 112 atau 113 atau (0342) 802791 dengan melaporkan lokasi kejadian, nama pemilik/objek kejadian, waktu kejadian dan titik kenal lokasi kejadian					1. Informasi kejadian kebakaran 2. KTP/identitas Pelapor 3. Bukti pendukung kejadian	2 menit	Laporan juga dapat berasal dari petugas melihat sendiri kejadian kebakaran, media online, telepon, SMS, dan lainnya
2	Mencatat identitas pelapor/masyarakat (nama pelapor, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi) dan detail/uraian kejadian kebakaran pada formulir pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					1. Laporan kejadian kebakaran diterima 2. ATK 3. Form laporan		1. Form laporan yang memuat informasi kebakaran dan identitas pelapor
3	Meneruskan informasi pengajuan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dari operator 112 atau 113 atau (0342) 802791 kepada UPT PMK dan pihak terkait lainnya					1. Form laporan yang memuat informasi kebakaran dan identitas pelapor		1. Laporan kejadian kebakaran diteruskan ke UPT PMK
4	Mencatat laporan di papan kejadian dan menginformasikan kepada Kepala UPT PMK dan petugas/regu siaga					1. Laporan kejadian kebakaran diteruskan ke UPT PMK	1 menit	Laporan kejadian kebakaran dicatat di papan kejadian dan dilaporkan ke Kepala UPT PMK
5	Memberikan instruksi kepada petugas untuk melakukan pengcekan terhadap kebenaran laporan kejadian kebakaran					Laporan kejadian kebakaran dicatat di papan kejadian dan dilaporkan ke Kepala UPT PMK	2 menit	Instruksi Kepala UPT PMK
6	Melakukan pengcekan ulang terhadap tempat kejadian kebakaran melalui telepon				informasi palsu	Instruksi Kepala UPT PMK	2 menit	Laporan kejadian kebakaran tervalifikasi benar
7	Memberikan pengarahan dan instruksi untuk menindaklanjuti laporan kejadian kebakaran yang diterima (mempersiapkan pasukan dan mobil PMK beserta perlengkapannya), sekaligus meneruskan laporan kepada Kepala Satpol PP					Laporan kejadian kebakaran tervalifikasi benar	5 menit	1. Laporan kejadian kebakaran diteruskan ke Kepala Satpol PP 2. Instruksi pengiriman armada PMK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
RESPON CEPAT PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN (PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN)

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Durasi	Output	Mutu Baku	Keterangan
		Pelapor/ Masyarakat	Operator 112/113/(0342) 802791	Petugas Layanan UPT PMK	Petugas/Regu Pemadam	Kepala UPT PMK					
8	Mengirimkan armada dan personil secara bertahap sesuai dengan kebutuhan							10 menit	1. Pemberangkatan Mobil Damkar 2. Respon Time (waktu berangkat dan tiba di lokasi) telah tercatat		
9	Mempersiapkan alat pelindung diri, peralatan/ perlengkapan dan unit kendaraan Pemadam kebakaran untuk menuju lokasi kejadian										
10	Melakukan penilaian kondisi di lokasi dan size up di lokasi untuk menentukan strategi dan teknik fire fighting Dalam penilaian kondisi harus memperhatikan: a. akses masuk dan keluar lokasi/TKP b. arah penjalaran api c. keberadaan barang berbahaya mudah terbakar d. letak sumber air terdekat e. struktur bangunan							2 jam	1. Lama waktu pemadaman telah dicatat		Durasi sesuai dengan tingkat kebakaran yang terjadi
11	Melaksanakan operasi pemadaman dan evakuasi										
12	Melakukan koordinasi dengan instansi, antara lain Polisi, Satpol PP, Kodim, PMI, PLN, PDAM, Dishub dan Instansi setempat terkait proses pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran										
13	Menintu bantuan unit terhadap instansi/ perusahaan yang memiliki mobil unit pemadaman (apabila diperlukan)										
14	Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran							10 menit	1. Data Faktual Korban Kebakaran dan Terdampak Kebakaran		
15	Melaporkan hasil pemadaman kebakaran dan hasil evakuasi korban secara elektronik kepada Kepala UPT PMK dan Kepala Satpol PP melalui alat komunikasi/ grup WhatsApp							5 menit	Laporan hasil pemadaman kebakaran dan hasil evakuasi korban		

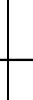
RESPON CEPAT PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN (PEMANDAMAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN)								
No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Ketelitian	Keterangan	
		Pelapor/ Masyarakat	Operator 112/113/(0342) 802791	Petugas Layanan UPT PMK	Petugas/Regu Pemandam	Kepala Satpol PP	Durasi	Output
16	Menyusun laporan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan Pemandaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Kemudian, menyampaikan secara berjenjang kepada Kepala UPT PMK dan Kepala Satpol PP					Laporan hasil pemandaman kebakaran dan hasil evakuasi korban	3 jam	Berita Acara Pelaksanaan Pemandaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
17	Mempublikasi hasil tindak lanjut atas kejadian kebakaran kepada masyarakat/penerima layanan					Berita Acara Pelaksanaan Pemandaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1 jam	Berita Acara Pelaksanaan Pemandaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
18	Mengarsipkan berkas Laporan Pelaksanaan Pemandaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yang ditindaklanjuti			 		Berita Acara diarsipkan	10 menit	Berita Acara diarsipkan

 <p>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR</p> <p>UPT PEMADAM KEBAKARAN (PMK)</p>	NOMOR SOP	:	188/SOP-16/410.118/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	:	03 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	:	-
	TANGGAL EFektif	:	03 MARET 2025
	DISAHKAN OLEH	:	Romiy Yosefa Nasalbesy,S.Sos.,M.M. PP Kota Blitar NIP. 3681104 193809 1 001
DASAR HUKUM	NAMA SOP	:	PEMELIHARAAN MOBIL DAMIKAR LAYAK FUNGSI
			KUALIFIKASI PELAKSANA
			<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku; Teliti, luwes, tertib, informatif, serta mampu berpikir analitis dan praktis; Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Blitar; Mengetahui dan memahami program dan kegiatan OPD; Mengetahui dan memahami peraturan dan prosedur terkait Pemeliharaan Mobil Damkar Layak Fungsii; Memiliki keterampilan yang cukup dalam melakukan Pemeliharaan Mobil Damkar Layak Fungsii; Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung; Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik; Cepat, tepat dan responsif

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. -	1. Perangkat komputer, printer dan jaringan internet 2. APK (Alat Perlengkapan Kantor) 3. ATK (Alat Tulis Kantor) 4. Pesawat Telepon dan Handy Talky 5. Surat Perintah Tugas (SPT) 6. Mobil Pemadam Kebakaran 7. Kendaraan Dinas (Roda 2 dan Roda 4) 8. Form Laporan/Berita Acara Pemeliharaan Mobil Damkar Layak Fungsi 9. Aplikasi pendukung lainnya
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Satpol PP	1. Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan sebagai data fisik dan elektronik

UPT PEMADAM KEBAKARAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMELIHARAAN MOBIL DAMKAR LAYAK FUNGSI

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Keterangan		
		Kepala UPT PMK	Koordinator Operasional PMK	Teknisi Operator Layanan	Mekanik Operator Layanan (Bengkel)	Pramudi/Driver	Kelengkapan	Durasi	Output
1	Memberikan disposisi kepada Koordinator Operasional PMK terkait pemeliharaan mobil damkar layak fungsi					Disposisi Kepala UPT PMK terkait pemeliharaan mobil damkar	Disposisi Kepala UPT PMK terkait pemeliharaan mobil damkar	5 menit	
2	Mengadakan rapat internal untuk membahas teknis persiapan (agenda, timeline) serta mempersiapkan pelaksana dan perlengkapan yang dibutuhkan					1. Arahan/Disposisi Kepala UPT PMK 2. Ruang Rapat 3. Komputer & Internet 4. ATK	1. Agenda 2. Timeline 3. Personil 4. Perlengkapan 5. Administrasi (Form BAPLJ, form kelengkapan lainnya)	3 jam	
3	Membawa unit kendaraan pemadam kebakaran untuk dilakukan pemeriksaan atau pemeliharaan rutin					1. Form BAPLJ 2. Form kelengkapan jalan mobil pemadam lainnya	Informasi Waktu kedatangan mobil pemadam	10 menit	
4	Melakukan perawatan rutin dan pemeriksaan rutin/berkala Mobil Pemadam Kebakaran. Apabila mobil pemadam sudah sesuai standar kelakian jalan, pramudi memarkir mobil pemadam untuk disiapkan operasional selanjutnya				kondisi OK & laik jalan men erlukan perbaikan	1. Form BAPLJ 2. Form kelengkapan jalan mobil pemadam lainnya	BA pemeriksaan Mobil Pemadam Kebakaran rutin/berkala (ok atau perlu perbaikan)	10 menit	
5	Apabila mobil pemadam ada permasalahan teknis atau kerusakan yang memerlukan perbaikan, Teknisi Operator Layanan melapor kepada Koordinator Operasional					BA pemeriksaan Mobil Pemadam Kebakaran rutin/berkala (perlu perbaikan)	BA pemeriksaan mobil pemadam (perlu perbaikan) dilaporkan ke Koordinator	10 menit	
6	Membuat Surat Rekomendasi Perbaikan dan memerintahkan Teknisi Operator Layanan agar mobil pemadam dimasukkan bengkel					1. BA pemeriksaan Mobil Pemadam Kebakaran rutin/berkala (perlu perbaikan) 2. Komputer & Printer	1. Surat Rekomendasi Perbaikan 2. Disposisi Perbaikan mobil pemadam di Bengkel	30 menit	
									

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMELIHARAAN MOBIL DAMKAR LAYAK FUNGSI

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Kepala UPT PMK	Koordinator Operasional PMK	Teknisi Operator Layanan	Mekanik Operator Layanan (Bengkel)	Pramudi/Driver	Kelengkapan	
7	Melakukan perbaikan mobil pemadam yang mengalami kerusakan atau permasalahan teknis					A	Hasil perbaikan mobil pemadam	Durasi menyuaikan lensa kerusakan mobil pemadam
8	Melakukan pemeriksaan ulang kelaikan mobil pemadam untuk mengecek hasil perbaikan mobil pemadam di bengkel				masih perlu perbaikan	1. Surat Rekomendasi Perbaikan 2. Disposisi Perbaikan mobil pemadam di Bengkel	Kondisional	Hasil perbaikan mobil pemadam
9	Memarkir Mobil Pemadam Kebakaran untuk disiapkan operasional selanjutnya					1. Hasil perbaikan mobil pemadam 2. Form BAPIJ	10 menit	BA Pemeriksaan Mobil Pemadam Kebakaran rutin/berkala (ok atau masih perlu perbaikan)
10	Membuat Berita Acara Perbaikan mobil pemadam kemudian melaporkannya kepada Koordinator Operasional secara langsung (melalui grup WA) dan secara tertulis (Berita Acara)					BA pemeriksaan Mobil Pemadam Kebakaran rutin/berkala (ok)	10 menit	Mobil Pemadam Kebakaran telah terparkir dan siap dioperasikan
11	Mendokumentasikan dan mengarsipkan Berita Acara Perbaikan mobil pemadam					1. Hasil perbaikan mobil pemadam 2. BA pemeriksaan Mobil Pemadam Kebakaran rutin/berkala (ok)	1 jam	Berita Acara Perbaikan mobil pemadam diterima oleh Koordinator Operasional
								Tembusan laporan ke Kepala UPT PMK
								Berita Acara Perbaikan mobil pemadam telah tersip

 <p>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR</p> <p>UPT PEMADAM KEBAKARAN (PMK)</p>	NOMOR SOP	:	188/SOP-17/410.118/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	:	03 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	:	-
	TANGGAL EFektif	:	03 MARET 2025
	DISAHKAN OLEH	:	Ronny Yoda Nasalbessy, S.Sos.,M.M. 
	NAMA SOP	:	PENYEDIAAN SARPRAS PEMADAMAN, PENGENDALIAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Keteriban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keteriban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; 		

11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. -	1. Perangkat komputer, printer dan jaringan internet 2. APK (Alat Perlengkapan Kantor) 3. ATK (Alat Tulis Kantor) 4. Pesawat Telepon dan Handy Talky 5. Surat Perintah Tugas (SPT) 6. Mobil Pemadam Kebakaran 7. Kendaraan Dinas (Roda 2 dan Roda 4) 8. Form Laporan/Berita Acara 9. Aplikasi pendukung lainnya
PENGATASAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Satpol PP	1. Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan sebagai data fisik dan elektronik



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYEDIAAN SARPRAS PEMADAMAN, PENGENDALIAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Kepala UPT PMK	Petugas Lapangan/ Teknisi	Staff/ JFU UPT PMK	Kepala Satpol PP	Kelengkapan	Durasi	
1	Memberikan disposisi kepada Koordinator Operasional PMK terkait penyediaan sarana dan prasarana pemadaman, pengendalian dan penyelamatan kebakaran	 Mulai				Disposisi Kepala UPT PMK terkait penyediaan sarpras	5 menit	Disposisi Kepala UPT PMK terkait penyediaan sarpras
2	Mengadakan rapat internal untuk membahas teknis persiapan untuk menghimpun usulan kebutuhan sarana dan prasarana pemadaman, pengendalian dan penyelamatan kebakaran					1. Arahan/Disposisi Kepala UPT PMK 2. Ruang Rapat 3. Komputer & Internet 4. ATK	3 jam	1. Notulensi rapat 2. Form Inventarisasi kebutuhan sarpras
3	Menyusun konsep daftar usulan pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman, Pengendalian dan Penyelamatan Kebakaran, mulai dari timeline, pelaksana dan perlengkapan yang dibutuhkan					1. ATK 2. Perangkat komputer 3. Notulensi rapat 4. Form Inventarisasi kebutuhan sarpras	2 jam	Konsep usulan pengadaan berupa: 1. Timeline 2. Tim pelaksana 3. Perlengkapan (teknis)
4	Menginstruksikan kepada Staf dan Petugas Lapangan (Teknisi) untuk mengidentifikasi kebutuhan perawatan Sarana dan Prasarana Pemadaman, Pengendalian dan Penyelamatan Kebakaran					Konsep usulan pengadaan berupa: 1. Timeline 2. Tim pelaksana 3. Perlengkapan	10 menit	Disposisi/instruksi ke Staf JFU (Administrasi) dan Petugas Lapangan (teknis)
5	Menyusun laporan kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman, Pengendalian dan Penyelamatan Kebakaran, kemudian menyampaikan usulan tersebut ke Kepala UPT PMK					1. Daftar kebutuhan pengadaan 2. ATK 3. Perangkat komputer 4. Jaringan internet 5. Printer	2 jam	Laporan kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman, Pengendalian dan Penyelamatan Kebakaran
6	Menerima laporan dan memverifikasi daftar kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman, Pengendalian dan Penyelamatan Kebakaran. Apabila disetujui, maka akan mengajukan kepada Kepala Satpol PP		 Ok, disetujui			Laporan kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman, Pengendalian dan Penyelamatan Kebakaran	30 menit	Laporan kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman, Pengendalian dan Penyelamatan Kebakaran yang telah terverifikasi diajukan ke Kepala Satpol PP

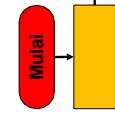
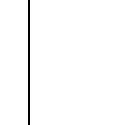
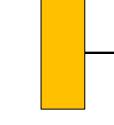
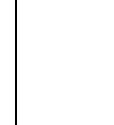
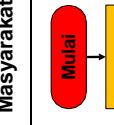
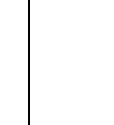
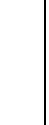
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYEDIAAN SARPRAS PEMADAMAN, PENGENDALIAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN						
No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Keterangan	
		Kepala UPT PMK	Petugas Lapangan/ Teknisi	Staff/ JFU UPT PMK	Kepala Satpol PP	Mutu Baku
7	Memberikan persetujuan terhadap usulan pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadamam, Pengendalian dan Penyelamatan Kebakaran	A			B tidak disetujui	Laporan kebutuhan pengadaan yang telah terverifikasi diajukan ke Kepala Satpol PP 1 jam
8	Berkordinasi dengan Subbag Umum dan Keuangan Satpol PP terkait pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadamam, Pengendalian dan Penyelamatan Kebakaran				Ok, disetujui	1. Laporan kebutuhan pengadaan yang telah disetujui Kepala Satpol PP 2. Kendaraan Dinas 1 minggu
9	Mengurus administrasi penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadamam, Pengendalian dan Penyelamatan Kebakaran sesuai dengan ketentuan				1. Hasil koordinasi 2. Berkas pengadaan barang dan/atau jasa	1 minggu 1 minggu
10	Mengarsipkan dan mendokumentasikan berkas pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadamam, Pengendalian dan Penyelamatan Kebakaran				1. Laporan kebutuhan pengadaan 2. Berkas pengadaan barang dan/atau jasa Selesai	1 jam Berkas telah diarsipkan

 <p>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR</p> <p>UPT PEMADAM KEBAKARAN (PMK)</p>	NOMOR SOP	:	188/SOP-18/410.118/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	:	03 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	:	-
	TANGGAL EFektif	:	03 MARET 2025
	DISAHKAN OLEH	:	 Renny Yaya Pasalbessy, S.Sos., M.M. KOTA BLITAR PEMERINTAH KOTA BLITAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UPT PEMADAM KEBAKARAN (PMK) Nomor: 19681104 198809 1 001
NAMA SOP	:	PENDATAAN, INSPEKSI DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keteribatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 			

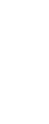
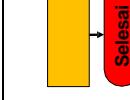
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. -	1. Perangkat komputer, printer dan jaringan internet 2. APK (Alat Perlengkapan Kantor) 3. ATK (Alat Tulis Kantor) 4. Pesawat Telepon dan Handy Talky 5. Surat Perintah Tugas (SPT) 6. Mobil Pemadam Kebakaran 7. Kendaraan Dinas (Roda 2 dan Roda 4) 8. Form Laporan/Berita Acara Pendataan, Inspeksi dan Pengendalian Kebakaran 9. Aplikasi pendukung lainnya
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Satpol PP	1. Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan sebagai data fisik dan elektronik

UPT PEMADAM KEBAKARAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDATAAN, INSPEKSI DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Keterangan		
		Pemohon/ Masyarakat	Petugas Layanan UPT PMK	Petugas Lapangan	Kepala UPT PMK	Kepala Satpol PP	Kelengkapan	Durasi	Output
1	Mengajukan surat pengajuan inspeksi dan pengendalian kebakaran ke UPT Pemadam Kebakaran/Satpol PP dan Damkar	 					1. Surat Pengajuan Inspeksi dan Pengendalian	5 menit	1. Surat Pengajuan Inspeksi dan Pengendalian memuat informasi pemohon, lokasi dan jadwal inspeksi
2	Mencatat identitas pemohon/masyarakat (nama pemohon, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi) dan detail/uraian pengajuan pada formulir pendataan, inspeksi dan pengendalian kebakaran						1. Surat Pengajuan Inspeksi dan Pengendalian 2. AIK 3. Form laporan	5 menit	1. Form Pengajuan Inspeksi dan Pengendalian 2. AIK 3. Form laporan
3	Mencatat form pengajuan inspeksi di buku agenda dan menjelaskan sistem dan mekanisme pengendalian kebakaran						1. Form Pengajuan Inspeksi dan Pengendalian 2. Buku Agenda	15 menit	1. Pengajuan tercatat di buku agenda
4	Menyerahkan formulir data bangunan kepada pemohon agar di isi oleh pemohon						1. Formulir Data Bangunan	10 menit	1. Formulir Data Bangunan telah diisi dan diserahkan ke pegawai
5	Memahami formulir data bangunan yang telah diisi, kemudian melaporkannya kepada Kepala UPT PMK						1. Form Pengajuan Inspeksi dan Pengendalian 2. Formulir Data Bangunan	15 menit	Berkas pengajuan disampaikan ke Kepala UPT PMK
6	Memberikan instruksi kepada petugas untuk melakukan inspeksi atau pengujian alat proteksi kebakaran dan pengendalian kebakaran						Berkas pengajuan disampaikan ke Kepala UPT PMK	5 menit	Instruksi Kepala UPT PMK
7	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan inspeksi dan pengendalian kebakaran						1. Instruksi Kepala UPT PMK 2. Lokasi dan Jadwal Inspeksi	1 hari	Checklist kesiapan peralatan dan perlengkapan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDATAAN, INSPEKSI DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Masyarakat	Petugas Layanan UPT PMK	Petugas Lapangan	Kepala UPT PMK	Kepala Satpol PP	Kelengkapan	Durasi	
8	Melakukan inspeksi atau pengujian alat proteksi kebakaran dan pengendalian kebakaran sesuai yang diajukan, meliputi: a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) b. Sistem Hydrant c. Sistem Fire Alarm d. Sistem proteksi kebakaran lainnya						1. SPT 2. Peralatan dan Perlengkapan 3. Berkas pengujian inspeksi	1 hari	1. Form Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi dan Pengendalian Kebakaran 2. Dokumentasi Kegiatan (foto/video)
9	Melaporkan hasil inspeksi alat proteksi kebakaran kepada Kepala UPT PMK dan Kepala Satpol PP secara lisan						1. Form Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi dan Pengendalian Kebakaran 2. Dokumentasi Kegiatan (foto/video) 3. Alat komunikasi	30 menit	Hasil inspeksi alat proteksi kebakaran telah dilaporkan secara lisan maupun melalui WA
10	Menyusun Berita Acara Hasil Inspeksi dan Pengendalian Kebakaran serta menyusun Surat Rekomendasi terkait hasil inspeksi alat proteksi yang telah dilakukan						1. Form Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi dan Pengendalian Kebakaran 2. Dokumentasi Kegiatan (foto/video)	2 jam	1. Draft Berita Acara 2. Draft Surat Rekomendasi
11	Mengasistensikan secara berjenjang Draft Berita Acara Hasil Inspeksi dan Pengendalian Kebakaran serta Draft Surat Rekomendasi kepada Kepala UPT PMK dan Kepala Satpol PP						1. Draft Berita Acara 2. Draft Surat Rekomendasi	1 jam	1. Draft Berita Acara 2. Draft Surat Rekomendasi
12	Memberikan persetujuan terhadap Berita Acara Hasil Inspeksi dan Pengendalian Kebakaran serta Surat Rekomendasi						1. Draft Berita Acara 2. Draft Surat Rekomendasi	30 menit	Berita Acara dan Surat Rekomendasi ditandatangani Kasat dan Ka UPT PMK
13	Menyampaikan Berita Acara Hasil Inspeksi dan Pengendalian Kebakaran serta Surat Rekomendasi atas kegiatan inspeksi alat proteksi kebakaran kepada pemohon						Berita Acara dan Surat Rekomendasi ditandatangani Kasat dan Ka UPT PMK	30 menit	Berita Acara dan Surat Rekomendasi ditandatangani Kasat dan Ka UPT PMK diterima oleh pemohon
14	Mengarsipkan berkas pengajuan Inspeksi dan Pengendalian Kebakaran yang ditindaklanjuti						1. Salinan Berita Acara 2. Salinan Surat Rekomendasi 3. Laporan pelaksanaan 4. Dokumentasi (foto/video)	30 menit	Berkas pengajuan telah diarsipkan

 <p>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR</p> <p>UPT PEMADAM KEBAKARAN (PMK)</p>	NOMOR SOP	:	188/SOP-19/410.118/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	:	03 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	:	-
	TANGGAL EFektif	:	03 MARET 2025
	DISAHKAN OLEH	:	  Ronny Yohanes Pasalbessy, S.Sos.,M.M. NIP. 19681104 198009 1 001
DASAR HUKUM	NAMA SOP	:	KUALIFIKASI PELAKSANA FASILITASI PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
			<p>1. Mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku;</p> <p>2. Teliti, luwes, tertib, informatif, serta mampu berpikir analitis dan praktis;</p> <p>3. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Satpol IPP Kota Blitar;</p> <p>4. Mengetahui dan memahami program dan kegiatan OPD;</p> <p>5. Mengetahui dan memahami peraturan dan prosedur terkait penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran);</p> <p>6. Memiliki keterampilan yang cukup dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran);</p> <p>7. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung;</p> <p>8. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik;</p> <p>9. Cepat, tepat dan responsif</p> <p>10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja</p>

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. -	1. Perangkat komputer, printer dan jaringan internet 2. APK (Alat Perlengkapan Kantor) 3. ATK (Alat Tulis Kantor) 4. Pesawat Telepon dan Handy Talky 5. Surat Perintah Tugas (SPT) 6. Mobil Pemadam Kebakaran 7. Kendaraan Dinas (Roda 2 dan Roda 4) 8. Form Laporan/Berita Acara Fasilitasi Penyelamatan Non Kebakaran 9. Buku Register Pelayanan 10. Formulir Pelayanan 11. Peralatan Resque dan peralatan pendukung lainnya 12. Aplikasi pendukung lainnya
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Satpol PP	1. Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan sebagai data fisik dan elektronik



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BLITAR**

UPT PEMADAM KEBAKARAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan	
		Pelapor/ Masyarakat	Operator 112/113/(0342) 802791	Layanan UPT PMK	Petugas Petugas/Regu Rescue	Kepala UPT PMK	Kepala Satpol IPP	Kelengkapan	Durasi	
1	Melaporkan bahwa telah melihat/mengalami kejadian non kebakaran melalui layanan 112 atau 113 atau (0342) 802791 dengan melaporkan lokasi TKP, nama pelapor, obyek kejadian, titik kenaikan kejadian dan informasi pendukung lainnya							1. Informasi kejadian nonkebakaran diterima 2. KTP/identitas Pelapor 3. Bukti pendukung kejadian	2 menit	Laporan kejadian nonkebakaran diterima
2	Mencatat identitas pelapor/masyarakat (nama pelapor, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi) dan detail/uraian kejadian non kebakaran pada formulir pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kejadian							1. Laporan kejadian nonkebakaran diterima 2. ATK 3. Form laporan		
3	Meneruskan informasi pengajuan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kejadian dari operator 112 atau 113 atau (0342) 802791 kepada UPT PMK dan pihak terkait lainnya							1. Form laporan yang memuat informasi kejadian nonkebakaran dan identitas pelapor		
4	Mencatat laporan di papan kejadian dan menginformasikan kepada Kepala UPT PMK dan petugas/regu siaga							1. Laporan kejadian nonkebakaran diteruskan ke UPT PMK	1 menit	Laporan kejadian nonkebakaran dicatat di papan kejadian dan dilaporkan ke Kepala UPT PMK
5	Memberikan instruksi kepada petugas untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran laporan kejadian nonkebakaran							Laporan kejadian nonkebakaran dicatat di papan kejadian dan dilaporkan ke Kepala UPT PMK	2 menit	Instruksi Kepala UPT PMK
6	Melakukan pengecekan ulang terhadap tempat kejadian nonkebakaran melalui telepon							Instruksi Kepala UPT PMK	2 menit	Laporan kejadian nonkebakaran terverifikasi benar
7	Memberikan pengarahan dan instruksi untuk mendaklanjuti laporan kejadian nonkebakaran yang diterima, sekaligus meneruskan laporan kepada Kepala Satpol PP							Laporan kejadian nonkebakaran terverifikasi benar Kejadian terkonfirmasi	5 menit	1. Laporan kejadian nonkebakaran diteruskan ke Kepala Satpol PP 2. Instruksi pengiriman aranda PMK

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan	
		Pelapor/ Masyarakat	Operator 112/113/(0342) 802791	Petugas Layanan UPT PMK	Petugas/Regu Rescue	Kepala UPT PMK	Kepala Satpol PP	Kelengkapan		
8	Mengirimkan armada dan personil secara bertahap sesuai dengan kebutuhan							1. Laporan kejadian nonkebakaran terverifikasi benar 2. Instruksi pengiriman armada PMK 3. Peralatan dan Perlengkapan rescue 4. APD 5. Unit kendaraan rescue	10 menit	1. Pemberangkatan Mobil Rescue 2. Respon Time (waktu berangkat dan tiba di lokasi) telah tercatat
9	Mempersiapkan alat pelindung diri, peralatan/ perlengkapan dan unit kendaraan rescue untuk menuju lokasi kejadian									
10	Melakukan penilaian kondisi di lokasi dan size up di lokasi untuk menentukan strategi dan teknik penyelamatan kejadian non kebakaran							1. Laporan kejadian nonkebakaran terverifikasi benar 2. Instruksi pengiriman armada PMK 3. Peralatan dan Perlengkapan rescue 4. APD 5. Unit kendaraan rescue	2 jam	1. Lama waktu pemadaman telah dicatat
11	Melaksanakan operasi penyelamatan non kebakaran									
12	Melakukan koordinasi dengan instansi, antara lain Polisi, Satpol PP, Kodim, PMI, PLN, PDAM, Dishub dan Instansi setempat terkait proses penyelamatan dan evakuasi korban kejadian							1. Peralatan dan Perlengkapan Rescue 2. APD 3. Unit kendaraan Damkar	10 menit	1. Data Faktual Korban dan Terdampak Kejadian
13	Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga yang terdampak kejadian nonkebakaran							1. Lama waktu penanganan telah dicatat 2. Data Faktual Korban dan Terdampak Kejadian	5 menit	Laporan hasil penyelamatan dan evakuasi korban kejadian
14	Melaporkan hasil penyelamatan dan evakuasi korban kejadian nonkebakaran kepada UPT PMK dan Kepala Satpol PP melalui alat komunikasi/ grup WhatsApp							Laporan hasil penyelamatan dan evakuasi korban kejadian	3 jam	Berita Acara Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban kejadian, menyampaikan secara berjenjang kepada Kepala UPT PMK dan Kepala Satpol PP
15	Menyusun laporan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban kejadian. Kemudian, menyampaikan secara berjenjang kepada Kepala UPT PMK dan Kepala Satpol PP									

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) FASILITASI PENYELAMATAN NON KEBAKARAN										
No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Ketengaran				
		Pelapor/ Masyarakat	Operator 112/113/(0342) 802791	Petugas Layanan UPT PMK	Petugas/Regu Rescue	Kepala Satpol PP	Kelengkapan	Durasi	Output	Mutu Baku
16	Mempublikasi hasil tindak lanjut atas kejadian nonkebakaran kepada masyarakat/penerima layanan							Berita Acara Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban kejadian	1 jam	Publikasi informasi hasil penyelamatan dan evakuasi korban kejadian
17	Mengarsipkan berkas Laporan Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban kejadian yang ditindaklanjuti							Berita Acara Pelaksanaan	10 menit	Berita Acara diarsipkan

 <p>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR</p> <p>UPT PEMADAM KEBAKARAN (PMK)</p>	NOMOR SOP	:	188/SOP-20/410.118/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	:	03 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	:	-
	TANGGAL EFektif	:	03 MARET 2025
	DISAHKAN OLEH	:	  <p>Kenny Yozza Pasalbessy, S.Sos.,M.M. NIP. 19681104 198309 1 001</p>
NAMA SOP	:	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAAN KEBAKARAN	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Keteriban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keteriban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 			

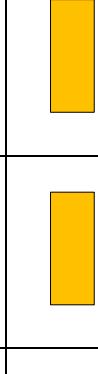
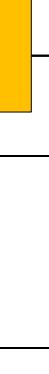
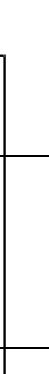
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. -	1. Perangkat komputer, printer dan jaringan internet 2. APK (Alat Perlengkapan Kantor) 3. ATK (Alat Tulis Kantor) 4. Pesawat Telepon dan Handy Talky 5. Kendaraan Dinas (Roda 2 dan Roda 4) 6. Peralatan pendukung pemberdayaan 7. Form Laporan/Berita Acara Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran 8. Aplikasi pendukung lainnya
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Satpol PP	1. Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan sebagai data fisik dan elektronik

UPT PEMADAM KEBAKARAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/TRELAWAN KEBAKARAN

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Keterangan			
		Pemohon/ Masyarakat	Petugas Layanan UPT PMK	Petugas Lapangan	Kepala UPT PMK	Kepala Satpol PP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Mengajukan surat permohonan pelatihan pemberdayaan ke Pos Damkar (UPT Pemadam Kebakaran) atau Kantor Satpol PP						1. Surat Pengajuan Pelatihan/ Pemberdayaan Masyarakat	5 menit	1. Surat Pengajuan Pelatihan/ Pemberdayaan Masyarakat	
2	Menerima surat permohonan pelatihan pemberdayaan masyarakat yang dikirim melalui email/se secara langsung						1. Surat Pengajuan Pelatihan/ Pemberdayaan Masyarakat	5 menit	1. Surat Pengajuan Pelatihan/ Pemberdayaan Masyarakat	
3	Mencairkan informasi pengajuan pemberdayaan di buku agenda meliputi nama pemohon, asal instansi/alamat, jadwal pemberdayaan yang diajukan, jumlah peserta dan informasi lainnya						1. Surat Pengajuan Pelatihan/ Pemberdayaan Masyarakat 2. Buku Agenda	15 menit	1. Pengajuan tercatat di buku agenda	
4	Mencairkan pengajuan pelatihan/ pemberdayaan di papan kejadian, kemudian meneruskan berkas pengajuan pelatihan/ pemberdayaan kepada Kepala UPT PMK dan Kepala Satpol PP sebagai tembusan						1. Form Pengajuan Pelatihan/ Pemberdayaan Masyarakat 2. Papan kejadian	15 menit	1. Pengajuan tercatat di papan kejadian	
5	Meninjau permohonan pelatihan/ pemberdayaan tersebut, kemudian mengecek agenda pada tanggal yang diajukan. Apabila bentrok, maka menginformasikan tanggal alternatif kepada pemohon						1. Form Pengajuan Pelatihan/ Pemberdayaan Masyarakat	1 jam	Berkas pengajuan disampaikan ke Kepala UPT PMK dan Kepala Satpol PP	
6	Memberikan instruksi kepada petugas lapangan untuk menindaklanjuti permohonan pemberdayaan/ pelatihan						Berkas pengajuan disampaikan ke Kepala UPT PMK	10 menit	Instruksi Kepala UPT PMK	
7	Menyiapkan alat pelindung diri, peralatan dan perlengkapan pendukung serta unit kendaraan pemadam kebakaran, kemudian menuju ke lokasi pemberdayaan masyarakat						1. Instruksi Kepala UPT PMK 2. Lokasi dan Jadwal Inspeksi	1 hari	Checklist kesiapan APD, peralatan dan perlengkapan	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAN KEBAKARAN

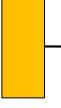
No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Masyarakat	Petugas Layanan UPT PMK	Petugas Lapangan	Kepala UPT PMK	Kepala Satpol PP	Kelengkapan	Durasi	
8	Melakukan persiapan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi/edukasi pencegahan kebakaran sesuai dengan standar operasional prosedur							1 hari	1. Form Pelaksanaan Kegiatan 2. Dokumentasi kegiatan (foto/video)
9	Melaporkan hasil pemberdayaan masyarakat kepada Kepala UPT PMK dan Kepala Satpol PP secara lisan maupun melalui grup WhatsApp (apabila kegiatan telah selesai)							30 menit	Hasil pemberdayaan masyarakat telah dilaporkan secara lisan maupun melalui WA
10	Menyusun Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat							2 jam	1. Draft Berita Acara Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat 2. Dokumentasi kegiatan (foto/video)
11	Mengasistensikan secara berjenjang Draft Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat kepada Kepala UPT PMK dan Kepala Satpol PP							1 jam	1. Draft Berita Acara Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat 2. Dokumentasi kegiatan (foto/video)
12	Memberikan persetujuan terhadap Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat							1 jam	Berita Acara Pemberdayaan Masyarakat ditandatangani Ka UPT PMK
13	Mempublikasi hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah ditindaklanjuti							30 menit	Bukti publikasi kegiatan pemberdayaan (linkscreenshot)
14	Mengarsipkan berkas pengajuan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti							30 menit	Berkas pengajuan telah diarsipkan

 <p>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR</p> <p>UPT PEMADAM KEBAKARAN (PMK)</p>	NOMOR SOP	:	188/SOP-21/410.118/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	:	03 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	:	-
	TANGGAL EFektif	:	03 MARET 2025
	DISAHKAN OLEH	:	Rommy Yogi Hasalbesy,S.Sos.,M.M. PP Kota Blitar NIP. 3681104 193809 1 001
DASAR HUKUM	NAMA SOP	:	TINDAK LANJUT PERMINTAAN GIAT KEGIATAN NON KEBAKARAN
KUALIFIKASI PELAKSANA	<p>1. Mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku;</p> <p>2. Teliti, luwes, tertib, informatif, serta mampu berpikir analitis dan praktis;</p> <p>3. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Blitar;</p> <p>4. Mengetahui dan memahami program dan kegiatan OPD;</p> <p>5. Mengetahui dan memahami peraturan dan prosedur terkait pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;</p> <p>6. Memiliki keterampilan yang cukup dalam melakukan Pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;</p> <p>7. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung;</p> <p>8. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik;</p> <p>9. Cepat, tepat dan responsif</p>		

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. -	1. Perangkat komputer, printer dan jaringan internet 2. APK (Alat Perlengkapan Kantor) 3. ATK (Alat Tulis Kantor) 4. Pesawat Telepon dan Handy Talky 5. Surat Perintah Tugas (SPT) 6. Mobil Pemadam Kebakaran (jika diperlukan) 7. Kendaraan Dinas (Roda 2 dan Roda 4) 8. Form Laporan/Berita Acara Giat Kegiatan Non Kebakaran 9. Aplikasi pendukung lainnya
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Satpol PP	1. Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan sebagai data fisik dan elektronik



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TINDAK LANJUT PERMINTAAN GIAK KEGIATAN NON KEBAKARAN

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Keterangan			
		Pemohon/ Masyarakat	Petugas Layanan UPT PMK	Petugas Giat Lapangan	Koordinator Petugas Giat Lapangan	Kepala UPT PMK	Kepala Satpol PP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Mengajukan surat permohonan pendampingan giat kegiatan non kebakaran ke Pos Damkar (UPT Pemadam Kebakaran) atau Kantor Satpol PP							1. Surat Pengajuan Pendampingan Giat Kegiatan Non Kebakaran	5 menit	1. Surat Pengajuan Pendampingan Giat Kegiatan Non Kebakaran	
2	Menerima surat permohonan pendampingan giat kegiatan non kebakaran yang dikirim melalui email/se secara langsung							1. Surat Pengajuan Pendampingan Giat Kegiatan Non Kebakaran	5 menit	1. Surat Pengajuan Pendampingan Giat Kegiatan Non Kebakaran	
3	Menyerukan surat permohonan kepada Kepala UPT Pemadam Kebakaran							1. Surat Pengajuan Pendampingan Giat Kegiatan Non Kebakaran	10 menit	1. Surat Pengajuan Pendampingan Giat Kegiatan Non Kebakaran	
4	Mengadakan rapat internal untuk membahas dan menyetujukan, antara lain: a. Waktu, sasaran dan obyek serta jumlah yang akan dilakukan giat kegiatan non kebakaran b. Tempat, bentuk dan metode giat kegiatan non kebakaran							1. Surat Pengajuan 2. Ruang Rapat 3. ATK 4. Perangkat komputer, printer dan jaringan internet	2 jam	Notulen rapat 1. Waktu, sasaran, objek giat 2. Tempat, bentuk dan metode giat 3. Personil yang bertugas	
5	Mengasistensikan secara berjajar terkait hasil rapat meliputi waktu, sasaran, objek, tempat, bentuk dan metode giat serta personil yang bertugas kepada Kasat a. Apabila disetujui, maka arahan pelaksanaan persiapan giat b. Apabila tidak disetujui, maka pemberian arahan penyempurnaan konsep							Notulen rapat 1. Waktu, sasaran, objek giat 2. Tempat, bentuk dan metode giat 3. Personil yang bertugas	1 jam	Persepsi Kepada Satpol PP terhadap: 1. Waktu, sasaran, objek, 2. Tempat, bentuk dan metode 3. Personil yang bertugas	
6	Menyiapkan administrasi pelaksanaan giat diantaranya: a. Draft Surat Perintah Tugas (SPT), b. Form kesekretriataran seperti Form Buku Kerja, Kertas Kerja/ Form Berita Acara dan lainnya							1. Waktu, sasaran, objek, 2. Tempat, bentuk dan metode 3. Personil yang bertugas 4. ATK	3 jam	1. Draft Surat Perintah Tugas 2. Buku Kerja 3. Form Berita Acara	
7	Mengasistensikan secara berjajar yang telah disiapkan, terutama Draft Surat Perintah Tugas (SPT) giat kepada Kepala UPT PMK dan Kepala Satpol PP							Draft Surat Perintah Tugas (SPT) dilampirkan nama personil yang ditunjuk	30 menit	Draft Surat Perintah Tugas (SPT) dilampirkan nama personil yang ditunjuk	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TINTDAK LANJUT PERMINTAAN GIAI KEGIATAN NON KEBAKARAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TINDAK LANJUT PERMINTAAN GIAT KEGIATAN NON KEBAKARAN

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Keterangan				
		Pemohon/ Masyarakat	Petugas Layanan UPT PMK	Petugas Giat Lapangan	Koordinator Petugas Giat Lapangan	Kepala UPT PMK	Kepala Satpol PP	Kelengkapan	Durasi	Output	Mutu Baku
17	Melakukan giat kebakaran non kebakaran sesuai dengan arahan briefing yang telah disampaikan							1. Laporan/Berita Acara Giat Kegiatan Non Kebakaran 2. Catatan kejadian penting 3. Dokumentasi dan bukti dukung	10 menit	Laporan/Berita Acara Giat Kegiatan Non Kebakaran diliporkan ke atasan secara berjenjang	
18	Melaporkan secara lisan hasil pelaksanaan giat kegiatan non kebakaran kepada atasan setelah selesai bertugas										
19	Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan giat dan menyampaikan laporan tersebut secara berjenjang ke atasan							1. Laporan/Berita Acara Giat Kegiatan Non Kebakaran 2. Dokumentasi	1 hari	Draft Laporan Hasil Pelaksanaan Giat Kegiatan Non Kebakaran	
20	Memeriksa dan menelaah laporan hasil pelaksanaan giat kegiatan non kebakaran a. Apabila sudah sesuai, maka menandatangani laporan tersebut dan memberikan arahan tidak lanjut b. Apabila belum sesuai, maka dikembalikan untuk diperbaiki							Draft Laporan Hasil Pelaksanaan Giat Kegiatan Non Kebakaran	2 jam	Laporan Hasil Pelaksanaan Giat Kegiatan Non Kebakaran ditandatangani Kepala UPT PMK	
21	Menyampaikan laporan yang sudah ditandatangani oleh Kepala PMK kepada Kepala Satpol PP Kota Blitar						Ok, setuju	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan giat ditandatangani Kepala UPT PMK 2. Perangkat Komputer 3. Jaringan Internet 4. Scanner	2 jam	Laporan Hasil Pelaksanaan Giat terkirim ke Kepala Satpol PP	
22	Melakukan pengarsipan dan pendokumentasian berkas laporan pelaksanaan giat kegiatan non kebakaran							Laporan Hasil Pelaksanaan Giat Kegiatan Non Kebakaran ditandatangani Kepala UPT PMK	30 menit	Laporan Hasil Pelaksanaan Giat Kegiatan Non Kebakaran ditandatangani Kepala UPT PMK	
								 → 	Selesai		

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

